

**MELAYU ISLAM BERAJA (MIB) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN
INSURJENSI DI BRUNEI DARUSSALAM**

**MELAYU ISLAM BERAJA AS AN INSTRUMENT OF INSURJENSI PREVENTION IN
BRUNEI DARUSSALAM**

Dadang Gunawan¹; Halkis²; Hindro Muriadi³

Universitas Pertahanan

(hindromuriadi_wd2004@yahoo.co.id)

Abstrak – Sejarah telah membuktikan bahwa kelompok pemberontakan di Brunei Darussalam disebabkan oleh kondisi politik. Oleh karena itu, banyak orang melihat masalah ini yaitu tentang bagaimana cara pemerintah mengatur kehidupan masyarakat, terutama ideologi *Melayu Islam Beraja* (MIB). Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana Melayu Islam Beraja sebagai sistem yang monarki absolut mampu dapat menjadi cara yang efektif dalam pencegahan insurjensi di negara Brunei Darussalam. Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai analisisnya. Berdasarkan hasil temuan data yang ada didapatkan fakta bahwa, melalui pendekatan *winning hearts and minds of the people*, diberlakukannya Melayu Islam Beraja dapat secara efektif dilakukan untuk melemahkan semangat yang muncul dari pemberontakan di selatan Brunei Darussalam, khususnya Serawak. Adanya dukungan sosial serta kesadaran yang kuat dari rakyat di Negara Brunei untuk terintegrasi dengan negara, menjadikan potensi pemberontakan dari rakyat kepada Pemerintahan semakin berkurang.

Kata Kunci: *Melayu Islam Baraja (MIB), Pencegahan, Insurjensi*

Abstract - History has proved that the insurgency group in Brunei Darussalam due to political conditions. Therefore, many people see this issue is about how governments organize people's lives, especially the ideology of *Malay Islam Beraja (MIB)*. This study basically aims to look further into how the Islamic Monarchy as an absolute monarchy system can be an effective way of preventing insuriers in Brunei Darussalam. In the process, this research uses qualitative method with descriptive approach as its analysis. Based on the findings of the available data, the fact that, through the approach of *winning hearts and minds of the people*, the enforcement of Malay Islamic Monarchy can be effectively carried out to weaken the spirit that emerged from the rebellion in the south of Brunei Darussalam, in particular Serawak. The existence of social support and the strong awareness of the people in Brunei to integrate with the state, has made the potential for revolt from the people to the Government is diminishing.

Key Words: *Melayu Islam Baraja (MIB), Prevention, Insurgency*

¹ Wakil Rektor 1 Universitas Pertahanan dan Dosen di Universitas Indonesia.

² Dosen Tetap Prodi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Indonesia.

³ Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana Program Studi Peperangan Asimetris NIM 120160102014 Cohort 5 TA 2016/2017 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email hindromuriadi_wd2004@yahoo.co.id.

Latar Belakang

Pasca perang dingin, karakteristik dari sifat peperangan berubah seiring dengan berubahnya teknologi dan zaman. Sejarah menunjukkan bahwa pola-pola gerakan insurjen juga ikut berevolusi baik itu taktik, strategi maupun motif gerakan insurjensi yang semakin berkembang dan semakin canggih. Berkembangnya strategi dan taktik yang dilakukan oleh gerakan insurjen di Brunei Darussalam harus juga diimbangi oleh pemerintah Brunei Darussalam khususnya strategi dan taktik untuk melawan kelompok insurjensi tersebut. Perkembangan strategi kelompok insurjen harus diwaspadai oleh pemerintahan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dari segi ancaman dan cara bertempur agar dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Brunei Darussalam. Untuk menghadapi insurjen, pemerintah tidak hanya fokus pada pendekatan/instrumen militer, melainkan harus juga mensinergikannya dengan politik/ideologi⁴.

Pada dasarnya taktik yang digunakan pemberontak adalah mereka

tidak akan menghadapi kekuatan lawan secara langsung dan hanya menyerang titik lemah atau rawan dari lawan dan kemudian memburu dengan masyarakat seperti teori yang dikemukakan oleh seorang ahli perang dari china Mao Tse Tung, ia menganalogikan taktik kelompok insurjen seperti “ikan yang masuk kedalam air,” dalam artian bahwa akan sulit bagi pasukan reguler untuk mendeteksi keberadaan kelompok insurjen tersebut⁵. Kelompok insurjen dalam pergerakannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk melakukan kamufase dan juga mendapatkan dukungan berupa simpati dari masyarakat.

Insurgency di Brunei Darussalam dilakukan oleh Partai Rakyat Brunei (PRB) yang telah dinyatakan sebagai partai politik yang dilarang di Brunei. PRB didirikan sebagai partai berhaluan kiri pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke dalam kemerdekaan penuh dari Inggris Raya. Partai berusaha untuk mendemokratisasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada rakyat.

⁴ David Barno, “Challenges in fighting a global insurgency”, *Parameters*, 2006, hlm. 15.

⁵ Paul Williams, “Security Studies : an Introduction”, (New York: Routledge, 2008), hlm 38

Partai Rakyat Brunei awalnya sebagai cabang dari *Malaysian People Party* (MPP) pada tanggal 21 Januari 1956, di rumah yang dimiliki oleh seorang pemimpin terkemuka, H. M. Salleh di Kampung Kianggeh, Kota Brunei, dua bulan setelah MPP didirikan di Malaya. Sekitar 150 orang menghadiri acara tersebut. Beberapa dari mereka termasuk Manan bin Muhammad, Muhammad bin Sulaiman, Zaini bin Haji Ahmad, Jais bin Haji Karim, Muhammad Jamaluddin, H. B. Hidup dan Jasin bin Affandy. Pertemuan itu diketuai oleh A. M. Azahari, dan dibantu oleh H. M. Salleh.

Pada awal juli 1955, A. M. Azahari telah mengunjungi Semenanjung malaya dan Singapura. Sementara di Singapura, ia bertemu dengan seorang terkenal tokoh politik, Harun Muhammad Amin (Harun Aminurrashid). Ia pernah didaftarhitamkan oleh pemerintahan Inggris di Malaya dan Brunei. Pertemuan secara substansial telah mempengaruhi pikiran dan tindakan dia.

M. Azahari juga bertemu dengan beberapa pemimpin radikal Melayu seperti Burhanuddin al-Helmy, Ishak Haji Muhammad dan Harun Muhammad Amin di rumah Ahmad Boestaman di Kampung Baru, Kuala Lumpur.

Pada tahun 1961, PRB menolak proposal untuk keanggotaan dalam federasi dengan Malaysia, yang diusulkan oleh Malaya's Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman meskipun pemerintah Brunei diuntungkan dalam federasi. Pada tanggal 12 Januari 1962, pemimpin PRB A. M. Azahari diangkat menjadi Majelis Negara Brunei dan PRB memenangkan 16 kursi terpilih dari 33 kursi legislatif pada bulan agustus tahun 1962.

Pertemuan pertama Dewan Legislatif dijadwalkan pada 5 Desember 1962 dan PRB menyatakan bahwa ia akan mengajukan sebuah resolusi untuk kembali dari Koloni Mahkota Borneo Utara dan Sarawak ke Brunei untuk membentuk sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai *North Borneo Federasi*, sebuah penolakan terhadap masuknya Brunei ke Malaysia dan kemerdekaan Brunei pada tahun 1963. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin III menolak usulan resolusi dan menunda pembukaan Dewan Legislatif untuk 19 desember 1962.

Pada tanggal 8 desember 1962 pemberontakan bersenjata oleh PRB sekarang dikenal sebagai Brunei Pemberontakan pecah di Brunei dan daerah perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Para pemberontak yang dikenal

sebagai Angkatan Nasional Kalimantan Utara (TNKU) atau Kalimantan Utara Tentara Nasional dan beberapa kota utama yang diduduki oleh TNKU. Namun, polisi Brunei tetap setia kepada Sultan dan pemerintahannya dan tambahan pasukan Inggris mendarat dari Singapura pada malam di hari yang sama.

Pada 9 Desember 1962, pemberontakan itu secara efektif rusak ketika Sultan Omar Ali Saifuddin III menyatakan PRB ilegal dan mengutuk TNKU untuk pengkhianatan meskipun insiden sporadis masih terus terjadi. Sultan juga menyatakan secara terbuka niat Brunei untuk tidak bergabung dengan federasi Malaysia. Pemberontakan berakhir lima bulan kemudian dengan penangkapan Yassin Affandi. Pemimpin PRB, A. M. Azahari, yang berada di Manila selama pecahnya pemberontakan, melarikan diri ke pengasingan di Jakarta.

Pada 13 oktober 1973 tahanan PRB yang menolak untuk meninggalkan partai melancarkan pelarian diri dan membangun kembali partai di pengasingan. Pada bulan desember, sebuah Komite Ad Hoc untuk Kemerdekaan Brunei didirikan di Kuala Lumpur. Selanjutnya pada 7 Mei 1974, PRB secara resmi diaktifkan kembali

dengan diberi nama komite eksekutif dengan A. M. Azahari sebagai presiden.

Yang PRB terus menggalang dukungan moral dan material internasional sepanjang tahun 1970-an dan mengakibatkan Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 3424 yang menetapkan prinsip-prinsip suksesi dan legitimasi bahwa setiap pemerintah yang didirikan di Brunei harus bertemu.

PRB saat ini diyakini masih beroperasi di pengasingan meskipun kemungkinan besar tidak aktif.

Pada tanggal 12 September 2005, mantan tahanan politik dan Sekretaris Jenderal PRB, Yassin Affandi, mendirikan bersama Pembangunan Nasional Partai. Pembangunan Nasional Pihak merupakan partai politik ketiga yang beroperasi secara legal di Brunei sampai saat ini.

Counter-Insurgency

“Counter-Insurgency is a comprehensive civilian and military effort designed to simultaneously defeat and contain insurgency and address its root causes”⁶.

Galula menyebutkan bahwa kontra insurjensi adalah hasil atau reaksi dari insurjensi⁷, dimana Galula menyatakan

⁶ US Government, “Counterinsurgency Guide”, 2009

⁷ David Galula, “Counter Insurgency Warfare : Theory and Practice”, Greenwood Publishing Group, 2006, hlm. 64

bahwa dalam segala situasi terdapat dua sisi yang saling berlawanan, seperti pada satu sisi terdapat insurjen dan gerakannya yaitu insurgensi, dan pada saat yang sama disisi lain yang berlawanan terdapat kontra insurjen dan yang melancarkan operasinya yaitu kontrainsurjen.

Pada dasarnya kontrainsurgensi adalah usaha pemerintah untuk mengatasi gerakan insurgensi dan menyelesaikan akar permasalahannya dengan mengkolaborasikan aspek-aspek penting secara komprehensif. Berperang melawan kelompok insurjen merupakan perang yang harus dilakukan secara hati-hati, karena perang ini merupakan peperangan yang terjadi diantara/dalam masyarakat yang mana masyarakat merupakan “*central prize*” dari kontra insurgensi. Kontra insurgensi harus difokuskan kepada pencarian informasi mengenai populasi dibandingkan hanya berfokus kepada penggunaan *use of force* secara konvensional. Selain itu, penggunaan pendekatan kontra insurgensi membutuhkan kordinasi lintas institusi nasional yaitu dimana lembaga-lembaga terkait seperti militer, polisi dan lembaga sipil yang terkait dengan keamanan harus saling bersinergi dan bekerja sama dan koordinasi ini merupakan hal yang penting untuk

mencapai keberhasilan dalam kontra insurgensi.

Kontra insurgensi bukanlah hal yang mudah namun dapat dilakukan, dalam hal ini kontra insurgensi bukanlah hanya sekedar penggunaan kekuatan militer semata namun juga disertai oleh pendekatan melalui politik. Kemenangan dalam kontra insurgensi dapat dicapai ketika pemerintah memenangkan *hearts and minds of the people*. Pemerintah tidak hanya sekedar menggunakan *hard approach* tetapi juga dipadukan dengan *soft approach* dimana kontes antara pemerintah dan kelompok insurjen fokus kepada bagaimana keduanya mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat dengan tindakan persuasif agar setiap tindakannya didukung oleh masyarakat. Selain itu, operasi kontra insurgensi harus melakukan pendekatan yang sifatnya berlapis yaitu melalui politik, ekonomi dan juga keamanan.

Hal pertama dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk melakukan kontra insurgensi adalah dengan mengetahui penyebab (*cause*) dari timbulnya gerakan insurgensi tersebut⁸.

⁸ Scoot Moore, “*The Basics of Counterinsurgency*”, *Small Wars Journal*, 2007, hlm. 18

Penyebab dasar timbulnya gerakan insurjensi terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Kondisi-kondisi apa yang mendukung timbulnya gerakan insurjensi tersebut (*opportunity*).
- Tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan insurjensi tersebut (*motive*).
- Cara-cara yang ditempuh (*means*).

Setelah menemukan penyebab timbulnya gerakan insurjensi tersebut, kemudian perlu dipetakan modal yang dimiliki oleh negara, yaitu:

- Kemampuan militer.
- Kapabilitas politik dan diplomatik.
- Kemampuan intelijen.

Hal ini perlu dipetakan karena insurjensi bukan semata-mata masalah keamanan yang memerlukan pendekatan militer saja, akan tetapi juga memiliki dimensi politik, sosial dan ekonomi. Selain pendekatan keamanan, perlu juga adanya pendekatan ekonomi dan informasi yang dikombinasikan menjadi satu dengan melalui kebijakan politik untuk dapat mengendalikan situasi. Selain itu, pendekatan ekonomi juga diperlukan khususnya apabila dalam pemetaan penyebab terjadinya kelompok insurjensi ditemukan adanya ketidakpuasan akibat ketimpangan ekonomi yang ada, kemudian informasi diperlukan juga informasi-informasi intelijen yang diambil

dari masyarakat atau populasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi serta sebagai “corong” propaganda pemerintah agraria rakyat tidak mendukung gerakan insurjensi.

Setelah menemukan penyebab munculnya gerakan insurjensi dan juga telah memetakan modal yang dimiliki negara, maka kemudian mewujudkan atau mengimplementasikan kebijakan dan strategi kontra insurjensi. Dalam implementasi kebijakan kontra insurjensi, terdapat variabel-variabel yang perlu diperhatikan⁹, yaitu :

Pengutamaan Tujuan Politis

Pengutamaan tujuan politis disini merupakan perwujudan legitimasi seta kedailatan pemerintahan yang sah. Penumpasan gerakan insurjensi bukan semata-mata hanya membasmi atau melawan para pemberontak, namun lebih kepada pengaktualisasian kewibawaan pemerintah.

Mengingat kontra insurjensi merupakan masalah yang perlu pemecahan komprehensif, maka kerjasama penyatuan usaha perlu disinergikan menjadi suatu usaha yang komprehensif dan terintegrasi, dimana

⁹ Agus Wibowo, “Kebijakan & Strategi Kontrainsurjensi : Studi Kasus DI/TII Jawa Barat”, 2015, hlm. 12-15.

kesatuan usaha tersebut meliputi bidang keamanan, politik, maupun ekonomi didukung dengan pasokan informasi yang cepat, tepat, dan akurat¹⁰. Termasuk dalam hal ini adalah implementasi pemanfaatan intelijen sebagai sumber informasi serta media sebagai “corong” informasi.

Memahami Karakter Manusia serta Lingkungan Sosiokultural

Dalam memenangkan “*heart and minds*” dari populasi, pemahaman karakter manusia serta lingkungan sosiokulturalnya dirasa sangat penting. Pemahaman akan sosiokultur insurjen maupun populasi ini penting karena pengetahuan akan karakter insurjen dapat menentukan taktik bahkan manuver apa yang diperlukan dalam mengatasi gerakan mereka, sementara pengetahuan akan karakter populasi/masyarakat akan dapat menentukan perolehan simpati serta dukungan bagi usaha kontra insurjensi.

Bersiap Untuk Konflik Jangka Panjang

Operasi kontra insurjensi adalah operasi jangka panjang. Hal ini mengingat walaupun pasukan pemberontak telah berhasil dinetralisir, namun ide-ide

pemikiran mereka belum tentu lenyap seketika. Perlu waktu, selain untuk menyembuhkan trauma para korban, juga untuk mengikis sisa-sisa ide maupun pendukung insurjensi yang ada. Satuhal yang perlu diperhatikan juga adalah konflik jangka panjang memerlukan biaya (baik moril maupun materiil) yang tidak sedikit. Logistik maupun mental pasukan kontra insurjensi perlu dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak cepat menyerah di tengah perjuangan.

Dalam pelaksanaan operasi kontra insurjensi tak jarang terdapat tindak kekerasan yang terjadi. Hal ini walaupun relatif sering terjadi di medan operasi, namun perlu ditekan jumlahnya sedemikian rupa karena hal ini sedikit banyak mempengaruhi dukungan populasi terhadap pemerintah dan lebih jauh lagi dapat mempengaruhi kewibawaan pemerintah yang sah sebagai kounter insurjen.

Belajar dan beradaptasi

Kontra insurjensi adalah operasi yang kompleks. Terdapat banyak variabel, komponen serta pertimbangan dalam implementasi strategi dan kebijakan kontra insurjensi. Adaptasi diperlukan pada setiap level operasional dan dalam setiap tahapan. Bahkan adaptasi juga

¹⁰ David Kilcullen, *Three Pillars of Counterinsurgency*, US Government Counterinsurgency Conference, 2006, hlm.47

diperlukan untuk mengimbangi taktik insurjen.

Rekonstruksi pasca operasi

Ada satu hal yang banyak dilupakan oleh para analis, yaitu rekonstruksi pasca operasi kontra insurjensi. Hal ini penting mengingat porak porandanya wilayah operasi setelah adanya gerakan insurjensi. Adapun rekonstruksi pasca operasi ini meliputi re-ideologisasi, pendidikan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana sosial dan budaya serta pendidikan nasionalisme kebangsaan. Adapun hal-hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir atau menekan tumbuhnya bibit-bibit baru gerakan insurjensi.

Melalui gerakan kontra insurjensi, pemerintah harus bisa menempatkan diri dalam posisi sebagai fungsi pelayan dan pelindung masyarakat yang dianggap mampu agar negara mendapatkan loyalitas dari masyarakat namun juga berjalan secara terpadu dengan penggunaan kekuatan militer yang bertujuan untuk melindungi populasi, ekonomi, infrastruktur, menghancurkan kelompok insurjen dan melemahkan dukungan masyarakat terhadap gerakan insurjen¹¹. Beberapa prinsip strategi dan

taktik untuk menghadapi insurjen yang meliputi¹² :

1. Pemerintah harus memiliki tujuan politik yang jelas
2. Pemerintah harus berfungsi sesuai dengan hukum.
3. Pemerintah harus memiliki rencana secara keseluruhan.
4. Pemerintah harus memiliki prioritas mengalahkan subversi politik, ketimbang insurjen.

Monarki dan Demokrasi

Monarki berasal dari bahasa Yunani “monos” yang berarti satu dan “archein” yang berarti pemerintah. Monarki merupakan jenis negara yang dipimpin oleh seorang penguasa kerajaan. Sistem Monarki adalah bentuk Negara tertua di dunia. Pada banyak Negara monarki raja hanyalah sekedar simbol kedaulatan Negara dan Perdana Menteri lebih berkuasa daripada Raja. Raja atau Ratu umumnya bertahta seumur hidup dan jika meninggal kekuasaannya akan diberikan kepada anak keturunannya. Akan tetapi terdapat juga Raja sebagai Kepala Negara memegang jabatan untuk jangka waktu

¹¹ Martin Libicki, "Byting Back : Regaining Information Superiority Againts 21st Century

Insurgents", (Airlington: RAND Corporation, 2007), hlm. 95

¹² Robert Thompson, “*Defeating Communist Insurgency : Experiences from Malaya and Vietnam*”, (London : Chatto & Windus, 1972), hlm.71

tertentu, seperti di Malaysia Raja sebagai Kepala Negara berkuasa.

Sedangkan Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Meskipun teori monarki merupakan teori pemerintahan tertua yang pernah ada, monarki juga mempunyai kelemahan. Dengan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan raja, maka raja dapat melakukan apapun yang ia kehendaki. Ia bebas memerintah rakyatnya semaunya sendiri. Hal ini dapat menciptakan pemerintah yang tirani dan dalam perkembangan selanjutnya akan

menjadi diktator di negara yang ia perintah.

Sedangkan teori demokrasi yang diklaim sebagai teori yang paling sempurna, namun teori ini juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain ; pertama, Para pemerintah yang mengatasnamakan wakil rakyat akan terus berusaha mempertahankan kedudukannya dengan berbagai macam dalih, seperti dalih konsensus nasional dan secara bersamaan memojokkan kaum oposisi yang berusaha menjatuhkannya dengan dalih disloyalitas pada Negara. Kedua, Suara mayoritas, yang kerap kali menentukan keputusan akhir dalam sistem demokrasi, seringkali menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang fatal karena pemerintah kerap “mendoktrin” rakyat dengan hal-hal yang berakibat buruk dalam berjalannya sistem suatu negara.

Terlepas dari kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori, dalam konstitusi secara jelas dan terang, sebenarnya membuka ruang kepada UU untuk memberikan keistimewaan kepada daerah berdasarkan historisnya. Konstitusi menghendaki demokrasi di daerah sekaligus juga mengakui kekhususan suatu daerah. Prinsip ini dapat disebut sebagai *lex specialis*

(khusus) di tingkat konstitusi yang tidak perlu dipersoalkan. Karena itu, alasan pemerintah bersikukuh soal mekanisme pengangkatan kepala daerah menjadi tidak terlalu kuat, apalagi membenturkan monarki dengan demokrasi.

Sistem Politik dan Pemerintahan

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai *Melayu Islam Beraja* (MIB), atau *malay Islam Monarki*. Negeri ini telah di bawah hipotetis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura.

Sistem Politik dan Pemerintahan Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan

ibukotanya Bandar Seri Begawan, yang merupakan kota terbesar di negara ini. Brunei terkenal sebagai negara yang bernuansa islami, hal ini terlihat dari dijadikannya Istana Nurul Iman sebagai ikon negara Brunei. Perkembangan Islam yang pesat di Brunei diawali pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Ali, Sultan ke-3 Brunei yang kemudian menurunkan sultan-sultan lain di wilayah Sambas dan Sulu. Jalur perdagangan juga merupakan sarana penyebaran Islam yang efektif di Brunei setelah jatuhnya Kerajaan Malaka oleh Portugis. Hingga saat ini, mayoritas penduduk Brunei menganut agama Islam dan beretnis melayu. Sistem pemerintahan Brunei menggunakan sistem kesultanan konstitusional atau Monarki Islam Melayu. Terdapat tiga komponen utama dalam pemerintahan Brunei, yaitu budaya Melayu, agama Islam dan kerangka politik Monarki. Ketiga komponen tersebut tergabung dalam konsep "*Melayu Islam Beraja*" (MIB). Sultan Brunei yang berkuasa saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang memerintah sejak 5 Oktober 1967 dan merepresentasikan kepala negara (Yang Di-Pertuan Agong), kepala pemerintahan, pemimpin keagamaan, sekaligus Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan.

Pengaruh kesultanan di Brunei bermula antara abad ke-15 dan abad ke-17 ketika dikuasainya wilayah barat laut Kalimantan dan bagian selatan Filipina. Pada masa tersebut, negara-negara Eropa juga melakukan ekspansi wilayah hingga ke Asia Tenggara. Salah satu negara Eropa, Inggris, kemudian memasuki Brunei dan resmi menjadikannya sebagai wilayah protektorat Inggris pada tahun 1888. Brunei meraih kemerdekaannya pada tahun 1984 dan mengalami pembaharuan politik pada tahun 2004. Perubahan politik Brunei yang terjadi pada tahun 2004, melahirkan pemberlakuan kembali 29 anggota Dewan Legislatif oleh Sultan, setelah dibekukan pada tahun 1984. Selain Dewan Legislatif, terdapat juga Dewan Keagamaan (*Religious Council*), Dewan Konstitusional (*Privy Council*) dan Dewan Pengganti (*Council of Succession*). Dalam hal penegakan hukum, pada awalnya, Brunei menggunakan penggabungan antara hukum kebiasaan Inggris dan hukum Islam. Penerapan hukum kebiasaan Inggris (*English Common Law*) tersebut berhubungan dengan Komite Yudisial yang ada di London yang berwenang pada peninjauan kembali hukum

kasus sipil Brunei, sedangkan penerapan hukum syariat (*sharia law*) berada di bawah naungan kekuasaan monarki Brunei. Pemberlakuan hukum sekuler dan hukum syariat dalam pengadilan tinggi Brunei mencerminkan adanya ketergantungan antara Brunei dan Inggris, sebagai negara eks-kolonialnya. Partai Politik juga tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam sistem politik di Brunei, karena hanya ada satu partai politik Brunei yang diakui secara legal, yaitu *Brunei Solidarity National Party* (PPKB). Pada tahun 2013, Sultan Brunei memperkenalkan undang-undang berdasarkan syariat Islam, yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2014.

Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih Brunei protektorat Inggris, Konstitusi Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh *British Common Law*. Hukum Islam tanah, tradisi dan adat istiadat, terutama yang Malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei.

Konstitusi Brunei sejak awal telah diberikan mayoritas kekuasaan kepada raja yang berkuasa, Sultan Brunei. Sultan bertindak sebagai Kepala Negara Brunei Brunei menurut Undang-Undang Dasar 1959 dan diberi otoritas tunggal atas kekuasaan eksekutif. Dia dibantu oleh lima badan atau dewan penasihat.

Hukum yang dirumuskan oleh Brunei Konstitusi memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris karena status negara sebagai protektorat Inggris. Amandemen Konstitusi pada tahun 1971 Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari Konstitusi Brunei.

Melayu Islam Beraja (MIB)

Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi

sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratis, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlul-sunnah Waljamaah”.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara, UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui suatu perjanjian tahun 1888. Meskipun penancangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana “Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu sejak berdirinya kerajaan Brunei dengan raja pertamanya yaitu Awang Alak Betatar atau Sultan Mohammad Syah.

Untuk memasyarakatkan ideologi MIB di kalangan rakyat Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah membentuk sebuah lembaga khusus seperti BP-7 di Indonesia yang bernama “Majelis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam

Beraja (MTKMIB)” yang diketuai Pehin Dato Abdul Aziz Umar (mantan Menteri Pendidikan). Lembaga ini bertugas untuk mejabarkan pengertian MIB dalam kehidupan kebangsaan dan menyebarkan kepada masyarakat. Disamping itu, penjabaran dan pemikiran MIB banyak dikeluarkan oleh Fakultas Kajian Brunei (Brunei Studies) di Universiti Brunei Darussalam (UBD).

Pengertian MIB mencakup tiga landasan pokok yaitu *Melayu, Islam dan Beraja*. Pengertian ketiga konsep dasar tersebut melalui uraian masing-masing yaitu: Istilah Melayu memiliki berbagai macam definisi seperti dikemukakan oleh ilmuwan Van Ronekl yaitu, bangsa Melayu ialah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau Lingga serta beberapa daerah di Sumatera khususnya di Palembang.” Tetapi pengertian definisi Melayu tersebut berbeda dengan konsep Melayu berdasarkan Konsitusi Malaysia yang menyatakan bahwa bangsa Melayu adalah orang yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu.

Sementara itu, pengertian Melayu berdasarkan konteks MIB adalah bangsa Melayu yang termaktub dalam Konstitusi Brunei Darussalam tahun 1959 yaitu 7

etnis yang tinggal di Brunei yaitu: Melayu Belait, Melayu Bisaya, Melayu Brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut, dan Melayu Tutong.

Hal itulah yang membedakannya dengan etnis Melayu di Malaysia dan Indonesia. Warga suku Melayu Brunei Darussalam disebut dengan istilah rakyat Kebawah Duli sebagai konsekuensi logis atas diakuinya hak-hak etnis Melayu Brunei tersebut dalam ideologi negara. Sementara itu bagi warga etnis lain diluar etnis Melayu Brunei disebut dengan istilah penduduk Kebawah Duli seperti etnis Cina dan India yang telah disahkan sebagai warga negara Brunei.

Islam pada ideologi MIB mengandung pengertian bahwa Brunei Darussalam adalah kerajaan Islam dan bukanlah negara sekuler. Penerapan nilai-nilai ajaran Agama Islam dirujuk kepada Agama Islam golongan Ahlus Sunnah Waljamaah yaitu mengikut Mazhab Imam Syafei.

Kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah golongan agama Islam yang menjadikan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama dan mengakui kekhalifahan Rasulullah (Khulafaurasyidin) yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Golongan

Ahlussunnah Wal Jamaah ini dipelopori oleh Imam Al Asyhari dari Irak dan golongan inilah yang membedakannya dengan golongan Mu'tazilah maupun Islam Syiah.

Sedangkan menurut Mufti Brunei, Pehin Abdul Aziz bin Juned bahwa Ahlussunnah Waljamaah adalah golongan yang mendukung atau menganut pendapat-pendapat atau kepercayaan yang datang dari Rasulullah SAW yang disebut juga dengan Sunnah Rasulullah. Sedangkan dalam tradisi Ahlus sunnah waljamaah mengakui adanya 4 mazhab utama yaitu: Imam Syafei, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa sejarah Brunei diawali dengan pemerintahan Raja Awang Alak Betatar yang kemudian masuk Islam dan menukar namanya menjadi Sultan Mohammad Syah pada tahun 1365 M.

Dasar negara Islam ini dijabarkan dalam bentuk penerapan Syariat Islam dalam urusan agama disamping penerapan hukum sipil bagi hal-hal tertentu mengikuti hukum Inggris. Begitu pula dalam bidang ekonomi, pemerintah Brunei Darussalam gencar mendirikan bank Islam bahkan mengharapkan jadi pusat keuangan Islam di kawasan. Begitu pula atas dasar Islam ini pulalah arus

keluar masuk barang dari luar dan ke dalam negeri diatur sedemikian rupa agar untuk menghalangi masuknya barang-barang yang diharamkan oleh ajaran Islam.

Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan keputusan atas sesuatu masalah dibantu oleh Mufti Kerajaan. Meskipun demikian bukan berarti umat non-Muslim tidak mendapat tempat di Brunei karena dalam Al Quran sendiri diakui hak-hak warga non-Muslim. Ajaran Islam pula memerintahkan tunduk dan patuh kepada seorang *Ulil Amri* dalam konteks ini adalah sebagai seorang Sultan yang akan membawa bangsa dan rakyatnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Rakyat Brunei diharapkan dapat mengamalkan ajaran Islam karena diyakini agama tersebut merupakan agama yang sempurna. Pengamalan ataupun perlakuan etnis Melayu dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beraja tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beraja

Unsur atau sila ketiga daripada dasar negara MIB adalah Beraja artinya Brunei merupakan negara kerajaan (monarki) yang dipimpin oleh seorang

raja secara absolut. Dalam konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakuran. Sehingga muncullah pribahasa dalam perspektif adat yang mengatakan "Raja tidak zalim, rakyat pantang menderhaka kepada raja" dan "Raja wajib adil, rakyat wajib taat" dari perspektif agama. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

- Raja sebagai payung Allah di muka bumi¹³.
- Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam¹⁴.
- Raja sebagai kepala negara¹⁵.
- Raja adalah kepala pemerintahan¹⁶.
- Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat¹⁷.

¹³ Sabri, A. Z. S. (2014). Raja ikon penyatuan bina negara bangsa berdaulat. Hal 12

¹⁴ Zainal Ahmad, "Membangun Negara Islam", (Yogyakarta : Pustaka Iqra, 2001, hlm. 24

¹⁵ Abdul Ghazali, "Etika agama dalam membangun masyarakat madani", (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 12

¹⁶ Sofian Effendi, "Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan. Nasionalisme, Pancasila, dan Globalisasi", Orasi Ilmiah UWM, 2008, hlm. 16

- Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata¹⁸.

Dibandingkan dengan kerajaan atupun negara lain di dunia, kedudukan Sultan tersebut lebih kuat dan telah diwariskan secara lama secara turun-temurun.

Ketiga unsur atau sila dalam MIB tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Belumah dapat dikatakan nasionalisme seseorang rakyat Brunei dinilai baik kalau tidak mengakui salah satu daripadanya seperti hanya mengakui Melayu dan Islam tapi tidak mengakui Beraja.

Raja Brunei dalam sejarahnya telah berhasil menunaikan kewajibannya dengan baik yang menjadi hak rakyat. Oleh sebab itu, rakyat juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya kepada raja yang menjadi hak seorang Raja yaitu taat dan setia serta mendukung kebijakannya yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam sistem Beraja terdapat 3 unsur yaitu: raja, pemerintahan dan rakyat. Raja akan dihormati dan dicintai

¹⁷ Juswandi, "Pemimpin Dalam Masyarakat Melayu", Pustaka Budaya (e-Journal), 2014, hlm.12

¹⁸ Muchamad Safa'at, "Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara". Ub Lecture, 2007, hlm.25

apabila pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan sendirinya rakyat kemudian akan menunjukkan kesetiaannya kepada raja. Pemerintah hendaknya dapat menjalankan roda administrasi dengan baik agar pembangunan berjalan dengan berhasil. Hal inilah yang sebenarnya dituntut oleh Agama Islam yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan Umat Islam sehingga dapat menunaikan kewajibannya baik *fardhu ain* maupun *kifayah*.

Berdasarkan pengalaman sejarah Melayu Brunei, Raja telah bertindak secara adil dan bijaksana sehingga tidak ada alasan bagi rakyat Brunei menolak kedaulatan raja. Raja telah memberikan tanggungjawabnya kepada rakyat dengan penuh amanah. Kepedulian raja terhadap keperluan umat Islam dibuktikan dengan pendirian berbagai perangkat hukum Islam dan lembaga keuangan Islam.

Berdasarkan penelitian, sistem monarki Brunei merupakan yang tertua di dunia sesudah kerajaan Denmark yang ditandai dengan kelestarian dinasti pewaris kerajaan. Sejak berdirinya Kerajaan Brunei tahun 1365 M, Kerajaan Brunei telah diperintah oleh 29 orang

Sultan. Teknis pemerintahan yang terjadi sejak diproklamirkannya kemerdekaan Brunei Darussalam hanyalah pada pembentukan Dewan Kabinet dan adanya keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui lembaga eksekutif (*Legislative Council / LegCo*).

Kerjasama antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk mengalahkan gerakan insurjen. Kerjasama ini dapat bersifat menyeluruh dan mengikat antara aktor keamanan dengan elemen-elemen lainnya seperti instansi pemerintahan, masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga mampu memberikan pencapaian dukungan masyarakat atau populasi yang lebih besar. Aktor keamanan baik militer dan juga polisi mampu melaksanakan kontra insurjensi secara efektif dan dapat menyediakan lingkungan yang aman, dimana diperlukan untuk pembangunan. Hal tersebut dapat terwujud dengan berintegrasi dengan sektor pemerintahan yang lainnya melalui kerjasama dan koordinasi secara implementatif dalam penyelenggaraan di bidang administrasi sehingga mampu mengembangkan dan menjaga kestabilan politik, sosial, dan ekonomi, serta mengurangi *relative*

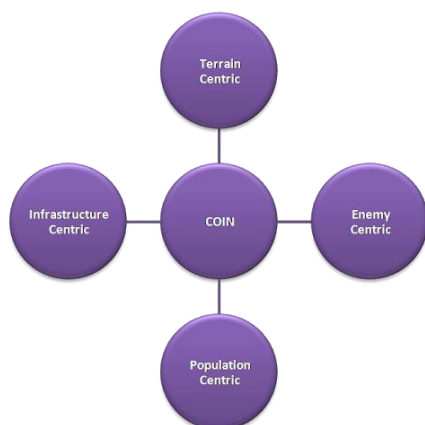
deprivation yang menjadi permasalahan selama ini. Terpenting dalam implementasinya, kontra insurjensi tersebut justru tidak memunculkan insurgensi-insurgensi baru yang bertolak dari ketidakpuasan masyarakat atau penduduk akibat dari pelaksanaan kontra insurjensi tersebut, kemudian aktor keamanan (militer dan polisi) bukanlah satu-satunya solusi dalam sebuah strategi kontra insurjensi, tetapi masih terdapat pilar-pilar lain seperti halnya pilar ekonomi dan politik dengan pendekatan-pendekatannya dalam mengatasi insurgensi.

Dari pembahasan diatas, Ada beberapa hal yang penting dalam implementasi doktrin COIN dilihat dari aktor keamanan, dimana COIN tersebut juga harus mencakup beberapa hal antara lain:

- *Terrain centric*, strategi COIN harus mampu menguasai wilayah dimana insurgen berada, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pergerakan insurgen dalam mengembangkan aksinya dan dukungan logistik. Aktor keamanan dapat melakukan kegiatan seperti halnya mengembangkan satuan komando kewilayahan, memonitor wilayah udara/laut untuk mencegah

terjadinya penyusupan logistik insurgen lewat udara/laut.

- *Enemy centric*, doktrin COIN harus meliputi bagaimana strategi COIN dapat menguasai musuh melalui pengamanan daerah rawan dengan melakukan patroli darat, laut dan udara serta melakukan strategi anti gerilya terhadap insurgen, menyiapkan satuan tempur.
- *Population Centric*, doktrin COIN bagi aktor keamanan harus mengaplikasikan pendekatan teritorial melalui kelompok masyarakat, agama guna mendapatkan *civil support*, dan melalui Operasi Teritorial yang didukung operasi Intelijen dengan memberdayakan masyarakat untuk memenangkan pikiran dan hati masyarakat tersebut.
- *Infrastructure Centric*, ikut berperan dalam membangun infrastruktur bersama-sama dengan aktor pemerintahan maupun non pemerintah dalam memajukan wilayah yang menjadi basis insurgen, poin ini lebih condong kepada peran serta aktor keamanan dalam mendukung sumber daya untuk keberadaan infrasturktur yang memadai.



Gambar 1. Cakupan Doktrin Integrative COIN aktor keamanan (Galula, 2006)

Satu hal yang perlu diingat adalah bagaimana kelompok insurgen dalam mengontrol populasi/masyarakat dengan berusaha merebut hati dan pikiran mereka sehingga kelompok insurgen ini bisa membentuk dan mengkonstruksi elemen politisnya menjadi lebih kuat dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Sebagaimana bagusnya strategi kontra insurjensi dalam usahanya memberantas insurjensi akan menjadi sebuah kesia-siaan ketika elemen politik yang dimiliki insurgen masih eksis dan tidak berhenti dalam melakukan perjuangannya untuk meraih political ends-nya. Kemudian Ho Chi Minh juga mengatakan bahwa:

“Time is the condition to be won to defeat the enemy. In military affairs time is of prime importance. Time ranks first among the three factors necessary for victory, coming before terrain and support of the people. Only

with time can we defeat the enemy”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak ada deadline khusus kapan kelompok insurgen harus menyatakan kemenangan sehingga hal ini menyulitkan pihak pemerintah yang sah karena waktu bagi pasukan militer adalah faktor penting yang menentukan kemenangan, semakin berlarutnya pergerakan insurjensi akan menambah besarnya biaya di pihak pemerintah dan membutuhkan berbagai macam strategi kontra insurjensi dalam menghadapinya.

Simpulan

Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki dasar negara Monarki absolut, yang dalam perkembangannya memiliki corak Monarki Konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Segala urusan negara dan pemerintah yang menyangkut hajat hidup warga brunei adalah di tangan sang sultan, yang saat ini sultan brunei adalah Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama

sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Dengan kekuasaan absolut yang di pegang oleh sang Raja memberikan ke stabilan politik dan ekonomi di negara Brunei Darussalam, hal ini disebabkan sifat dan segala kebijakan sang Raja sangat lah pro terhadap rakyat sehingga rasa kepercayaan rakyat kepada sang Raja tidak perlu di pertanyakan lagi. Dari sebab itu rakyat sangatlah mencintai sang Rajanya dan mematuhi segala peraturan yang di berikan oleh sang raja, tidak alasan bagi rakyat untuk tidak menghormati dan mencintai sang raja. Dengan MIB sebagai ideologi negaranya, Brunei memposisikan negaranya menjadi salah satu negara yang mempunyai kestabilan dalam bidang ekonomi dan politik di kawasan ASIA. Bahkan terhadap kelompok insurjensi pun Brunei Darussalam tidak mau ambil resiko untuk menghadapinya. Kelompok insurjensi melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan cara yang tidak biasa, oleh sebab itu pemerintah harus dapat

menyesuaikan diri melawan kelompok insurjen dengan cara yang tidak biasa pula. Adapun strategi kontra insurjensi yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan *hard approach* yaitu *use of force* dan juga *soft approach* yaitu dengan cara *winning the hearts and minds of the people*. Tantangan pemerintah yaitu harus dapat beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi dan cara-cara berperang yang dilakukan oleh kelompok insurjen. Pemerintah Brunei Darussalam harus bisa mengikuti pola dan teknologi kelompok insurjensi tersebut dengan mengembangkan kemampuan dan kerjasama antar lembaga keamanan terkait.

Daftar Referensi

Buku

- Ahmad, Z. A. 2001. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra.
- Galula, D. 1964. *Counter Insurgency Warfare: Theory and Practice*. New York : Praeger Security International
- Ghazali, A. R. 2000. *Etika agama dalam membangun masyarakat madani*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Martin C. Libicki, D. C. 2007. *Byting Back : Regaining Information Superiority Against 21st Century Insurgents*. Airlington: RAND Corporation..
- Reksoprodjo, AHS. 2016. *Pattenrns and Pillarsm of Insurgency*. (AHS. Reksoprodjo, Performer). Bogor : Indonesia Defense University
- Sukma, R. 2004. *Security Operations in Aceh : Goals, Consequences, and Lessons*.

Thompson, R. 1972. *Defeating Communist Insurgency : Experiences from Malaya and Vietnam*. London : Chatto & Windus.

US Government Counterinsurgency Guide (2009).

Williams, P. D. 2008. *Security Studies : an Introduction*. New York: Routledge.

Jurnal

Barno, D. W. 2006. *Challenges in Fighting a Global Insurgency*.
<http://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/Articles/06summer/barno.pdf> (Diakses pada 20 April 2017)

Barno, D. W. 2006. *Challenges in fighting a global insurgency*. *Parameters*,
<http://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/Articles/06summer/barno.pdf> (Diakses pada 22 April 2017)

Juswandi, J. 2014. *Pemimpin Dalam Masyarakat Melayu*”, *Pustaka Budaya (e-Journal)*, Vol. 1(2).

Kilcullen, d. J. 2006. *Three Pillars of Counterinsurgency*.
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf (Diakses pada 21 April 2017)

Moore, S. R. 2007. *The Basics of Counterinsurgency*
<https://www.google.com/url?sa=t&ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipuaC719bZAhURTY8KHbaFBQUQFgg6MAE&url=http%3A%2F%2Fsmallwarjournal.com%2Fdocuments%2Fmoorecoinpaper.pdf&usg=AOvVaw3zPfkEECVTf7wcaTKNHjz1> (Diakses pada 24 April 2017)

Wibowo, A. 2015. *Kebijakan & Strategi Kontrainsurgensi : Studi Kasus DI/TII Jawa Barat*.
http://www.academia.edu/14418302/Kebijakan_and_Strategi_Kontrainsurgensi_Studi_Kasus_Pemberontakan_DI_TII_Jawa_Barat (Diakses pada 22 April 2017)